

PILKADA SERENTAK: PELUANG DAN TANTANGAN

Untuk pertama kalinya, pada akhir tahun 2015 ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung secara serentak. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang merupakan awal dari sebuah langkah penataan demokrasi di negeri ini. Sebuah langkah yang cukup besar yang menyimpan peluang sekaligus tantangan dalam pelaksanaannya. Pilkada serentak akan berlangsung di 269 daerah, dengan rincian sebagai berikut: 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati dan 36 pemilihan wali kota dan wakil walikota.

Tujuan dilaksanakannya Pilkada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi (kpu.go.id). Hal ini seiring dengan salah satu dasar pemikiran penyelenggaraan pilkada secara serentak yaitu pertimbangan efisiensi. Walaupun Pilkada serentak yang akan diadakan pada bulan Desember 2015 nanti mensyaratkan sejumlah dana yang besar, namun apabila dibandingkan dengan Pilkada yang dilangsungkan secara terpisah-pisah, pola Pilkada serentak ini diprediksikan dapat menurunkan total anggaran yang diperlukan. Dengan payung hukum Undang-undang nomor 8 tahun 2015, Pilkada serentak dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien. Dari sisi anggaran, penyelenggaraan Pilkada serentak jauh lebih murah dibandingkan dengan Pilkada yang dilaksanakan secara terpisah di masing-masing daerah. Biaya Pilkada untuk kabupaten/kota mencapai Rp 25 miliar, sedangkan untuk Pilkada provinsi mencapai Rp 100 miliar, sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan untuk penyelenggaraan Pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Sedangkan apabila Pilkada dilaksanakan secara serentak biaya yang diperlukan sekitar Rp 10 triliun (nasional.kompas.com). Lebih lanjut, dengan Pilkada serentak pengaturan dan penyelenggaraannya akan lebih terstandarisasi, baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pra-pelaksanaan semuanya jelas dari segi prosedur dan waktunya. Sehingga harapannya ketika terjadi permasalahan akan lebih mudah ditangani.

Namun demikian muncul beberapa kekhawatiran terkait penyelenggaraan Pilkada serentak. Yang pertama, terkait dengan kesiapan pemerintah daerah. Pilkada tahun 2015 ini masih dibebankan kepada APBD. Dana APBN hanya akan digunakan sebagai dana penyokong apabila terdapat kekurangan dana APBD. Dengan demikian diperlukan kesiapan daerah untuk menyiapkan sejumlah anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada pada Desember 2015. Apakah saat ini setiap daerah sudah memiliki kesiapan tersebut? Yang kedua, potensi konflik di Pilkada serentak juga cukup tinggi. Apabila terjadi masalah atau konflik di beberapa daerah, maka jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan masalah keamanan. Karenanya, kesiapan dari aparat kepolisian untuk menjaga keamanan di setiap daerah menjadi hal yang patut mendapat perhatian. Yang ketiga, kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengganggu kelancaran Pilkada karena alasan politis. Hal ini harus diantisipasi baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 ini sangat tergantung pada kesiapan berbagai pihak. Untuk itu diperlukan peran serta semua pihak termasuk masyarakat untuk mendukung dan mengawasi proses Pilkada mulai dari awal hingga akhir agar berjalan sukses. Mari kita kawal persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2015! (Harida Indraswari).

Referensi:

- Kpu.go.id,(2015),“Arief: Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran”,
<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran>,
diambil 9 April 2015.
- Kompas.com, (2012),“Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran”,<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/10011128/Pilkada.Serentak.untuk.Efisiensi.Anggaran>, 9 April 2015.